

# **Wakil Ketua MPR Miris 72 Persen Muslim Indonesia Buta Aksara Al Quran**

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengungkapkan bahwa ada 72 persen lebih masyarakat muslim yang buta mengaji. Yandri mengatakan kondisi ini sangat miris mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam."Kita sadar 72 persen itu angka yang mengkhawatirkan," kata dia di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Sarsehan Nasional Pengentasan Buta Aksara Quran Nasional dengan Dewan Pengurus Pusat Lembaga Pembinaan Qiroatil Quran Indonesia (LPQQ), di lobi DPR RI, Jakarta Pusat pada Ahad, 5 Maret 2023. Menurut Yandri, MPR bersama LPQQ didukung oleh pemerintah berupaya mengentaskan permasalahan ini. Ia mengatakan, kehidupan berbangsa dan bernegara tegak lurus dengan nilai sila pertama, yakni Ketuhanan yang Maha Esa."Bagaimana mau berbangsa dan bernegara dengan baik, kitab suci mereka saja tidak paham. Itu salah satu pengamanatan nilai Pancasila menurut saya," kata politikus Partai Amanat Nasional itu. Untuk mengentaskan buta baca Al Quran ini, menurut Yandri akan diadakan sebuah pelatihan khusus untuk para pengajar."Dengan metode khusus sehingga sekarang orang bisa sangat cepat membaca Alquran," kata dia. Kesejahteraan Guru Ngaji Yandri sempat menyinggung terkait kesejahteraan guru mengaji. Hal tersebut dibahasnya menyambung pendapat dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Dewan Penasehat LPQQ. Yandri memaparkan untuk menunjang kesejahteraan guru mengaji akan diberlakukan skema asnaf zakat."Ya ini mau saya dialog kan dengan Baznas, karena kan salah satu golongan yang menerima zakat itu kan orang yang berjuang di jalan Allah salah satunya guru ngaji," katanya. Yandri mengaku akan membawa perbincangan ini bersama dengan ketua umum dan sekretaris jenderal LPQQ guna menghasilkan dialog berkemajuan untuk guru mengaji."Memang yang sebagian besar lillahi ta'ala tak berharap imbalan materi tapi tidak bisa kita biarkan karena kita ingin mereka bisa mengajar dengan kualitas terbaiknya waktu terbaiknya dari sisi persoalan dana dan kebutuhan sehari-hari negara hadir termasuk Baznas," katanya.